

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antoni Putra. “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi”.
Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 17 No. 1 - Maret 2020. Hlm. 5
-, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17. No. 1, Maret 2020, hlm.2
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 12
- Arief Hidayat, *Kebebasan Berserikat Di Indonesia (Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum*, BP-UNDIP, Semarang, 2006, hal 47
- A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 119.
- Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 43-44.
- Arif Hidayat, Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum* 4 (2) 2019, Hal.147-159. Doi : 10.26623/Jic.V4i2.1654
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia cetakan ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 90.
- Clapp, James E., 1996, *Random House Webster’s Pocket Legal Dictionary*, New York: Random House Reference, hlm. 232.
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, (Bandung: Nuansa dengan Nusamedia, 2004), hlm. 15.
- Dedi Soemardi, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Indhillco.Hlm. 73
- Fajar Laksono Soeroso,” Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi,jakarta, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014,hal.65
- Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, *ARENA HUKUM Volume* 10, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 241.

- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* JakartaKonstitusi Press, 2006 hlm 2-4
-, *Perihal Undang-Undang*,(Jakarta:Rajawali Press,2011), Hlm. 180.
- K helda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, hal. 25.
- Muhammad Fadli. “Pembentukan Undang Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 01 - Maret 2018. Hlm. 49.
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, cetaka kedua, Jakarta , 2010, hal 40-41.
- M. Muslih,” NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *jurnal hukum legalitas*, Volume IV Nomor 1, hal 139.
- Muhammad Fadli. “Pembentukan Undang Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 01 - Maret 2018. Hlm. 49.
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*. (Jakarta : Rajawali Press, 1993). Hlm 69.
- Soetiksno,*Filsafat Hukum*,(Jakarta:Pradnya Paramita,1991),hlm.13
- Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 147.
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Perkembangan Dan Sistem Demokrasi Di Indonesia*, BPFE – Yogyakarta, 2010, .hal 62.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Jogjakarta, hal 107-108.
-, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. ix
-, *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan*, (Bandung:Alumni, 1981), Hlm. 29
-, *Hukum Dan Masyarakat*. Cet 1. Cv. Mandar Maju. Bandung. 1980. Hlm. 45.

- Wiryo Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989. hal. 10 dikutip dari bukunya Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, hal. 14.
- Yoyon M. Darusman Dan Bambang Wiyono, *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2019)
- Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, UI Press, Jakarta, 1998, hlm., 2.
- Lita Tyesta ALW, Aspek Penting Reformasi Regulasi (Perspektif Pembentukan Peraturan Perundangan), Orasi Ilmiah Disampaikan Pada Dies Natalis Ke-61 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 9 Januari 2018, Hal, 3.

JURNAL.

- Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal *LEGISLASI INDONESIA*, Vol 17. No. 1, Maret 2020, hlm.2
- Arif Hidayat, Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum* 4 (2) 2019, Hal.147-159. Doi : 10.26623/Jic.V4i2.1654
- B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.
- Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, *ARENA HUKUM Volume* 10, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 241.
-, Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2017, Hlm. 247
- I Dewa G. Palguna, “*Constitutional Question*: Latar Belakang Dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 17 Januari 2010, H. 3.
- I Putu Eka Cakra, Aditya Yuli Sulistyawan, Kompatibilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 02, November 2020, Hlm, 66.
-, Aditya Yuli Sulistyawan, Kompatibilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 02, November 2020, Hlm, 67
- Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1994 h. 11

....., 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 297-298. Dalam, M. Muslih, "NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *jurnal hukum legalitas*, Volume IV Nomor 1, hal 134.

Mantoha, *demokrasi dan negara hukum*, jurnal hukum no.3 vol. 16 juli 2009:379-395.

Miftakhul Huda, September 2007, "Petita Dalam" Dalam Pengujian Undang-Undang, Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, H. 144.

Mohammad Mahrus Ali, "Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, H. 176.

Muhammad Fadli. "Pembentukan Undang Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 01 - Maret 2018. Hlm. 49.

Nanang Sri Darmadi, Sh., Mh, Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol Xxv, Agustus 2011, H.676.

Osgar Sahim Matompo, Wafda vivid izziyana, KONSEP OMNIBUS LAW DAN PERMASALAHAN RUU CIPTA KERJA, *Rechtsstaat Nieuw*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020, hlm. 23.

Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari Dewi, Tegar Satrio W. Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Hlm. 193.

S.F. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4, h. 9

Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 3, September 2014, hlm. 421

PERATURAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; putusan Mahkamah

Konstitusi nomor 91/puu-xvii/2020;

INTERNET

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/25/dinyatakan-inkonstitusional-mengapa-uu-cipta-kerja-tetap-berlaku-ini-penjelasan-mk> diakses pada 19 mei 2022.

<https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>. Diakses Pada 12 Mei 2022

Jimly Asshiddiqie, “Uu Omnibus (*Omnibus Law*), Penyederhanaan Legislasi, Dan Kodifikasi Administratif”, <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif> Diakses Pada 13 Mei 2022

<https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024> Diakses Pada 15 Mei 2022